

Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui *Electronic Procurement* Di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah

Nilna Azizah^{1*}, Maryono²⁾

^{1,2} Magister Administrasi Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

*Corresponding Author: nilnaazizah@gmail.com

Abstract: *This study aims to identify the implementation of E-Procurement at PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan Distribution Main Unit, especially the obstacles confronted. E-Procurement, which uses the internet as a means of information and communication, is expected to increase the efficiency of goods and services procurement. This research uses a qualitative approach with a focus on the implementation of E-Procurement at PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan Distribution Main Unit. The data was collected through interviews, observations, documentation studies, and analyzed using the Miles and Huberman model. The results of the study found that the implementation of E-Procurement at PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan Distribution Main Unit is well implemented based on indicators of quantity, quality, and timeliness. However, there are obstacles in the direct procurement process. The solution that has been done to deal with the obstacles of the implementation is to provide comprehensive counseling for Electronic Procurement users*

Keywords: *E-Procurement, PLN, Implementation Efficiency*

PENDAHULUAN

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi perusahaan yang menawarkan layanan di Indonesia dan memiliki tujuan untuk mewujudkan proses penerimaan pengadaan barang dan jasa yang bermutu untuk seluruh pemangku kepentingan. Salah satu peran penting dari BUMN telah diperankan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yakni penyelenggaraan layanan pada sektor listrik yang sudah sangat responsif menunjukkan keterbukaan dalam perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yaitu implementasi *Electronic Government (e-government)*. Evolusi dari *e-government* diimplementasikan dalam berbagai sektor

khususnya pada aktivitas organisasi terkait tugas organisasional, bidang pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu dari hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Direksi (Perdir) PT PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan serangkaian kegiatan dalam memprakarsai pengadaan barang dan jasa melalui pengidentifikasian keperluan dan anggaran, merencanakan, melaksanakan tahapan, menandatangani dan melaksanakan kesepakatan (MoU), dan menerima hasil penyelenggaraan. Namun, pada proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa ada beberapa masalah maupun kasus yang ditemukan, yang mana hal ini membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi terhambat.



Interaksi secara luring antara panitia dan vendor diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa melalui metode konvensional sebelum tahun 2008. Dalam proses pengadaan barang/jasa melalui metode ini, masih banyak terdapat pelanggaran khususnya proses pelaksanaan.

Berdasarkan analisis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, problematik ini muncul akibat pelanggaran etik maupun prosedur seperti adanya pengaturan, masalah transparansi, serta rendahnya kesadaran panitia terhadap kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan. Dari penjelasan diatas terkait dengan adanya penyimpangan yang mana dalam hal ini bersifat administratif serta terkait dengan perhitungan dana, yakni praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme anggaran sehingga menyebabkan kerugian bagi instansi keuangan serta pihak terkait lainnya. Oleh karenanya, diperlukan inovasi dalam menanggulangi fenomena tersebut. Penerapan teknologi dan informasi menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Wujud dari adanya pendayagunaan teknologi dan informasi dalam tuntutan pengadaan barang dan jasa ialah *E-Procurement*.

Sebelum dilakukan secara elektronik, pengadaan di Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilakukan secara konvensional. Metode konvensional memerlukan hubungan/aksi secara tatap muka antara panitia pengadaan sehingga menjadi kurang efektif dan efisien. Adanya potensi pelanggaran seperti eksklusif ataupun pemberian hak eksklusif pada vendor tertentu disebabkan oleh pengadaan melalui metode konvensional yang dianggap sebagai pemborosan waktu dan uang, kekurangan embaran, dan persaingan yang tidak sehat (Tatsis *et al.*, 2006). Purwanto (2009) pada temuannya mengenai "Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara *E-Procurement*", terdapat beberapa permasalahan yang timbul saat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui metode konvensional, berupa: a) kurangnya pengawasan; b) penyelewengan

kekuasaan; c) pelanggaran kontrak; d) praktik KKN; e) redupnya transparansi; dan f) rendahnya kualitas SDM.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan terkait optimalisasi penggunaan *E-Procurement* juga dipengaruhi oleh konteks organisasi internal dan eksternal. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan dan menggunakan *E-Procurement* dapat mengurangi tekanan biaya barang dan jasanya karena sistem tersebut lebih memungkinkan untuk mengikuti proses yang transparan dan kompetitif. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Hasti (2012), dengan judul "Evaluasi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Makassar", menemukan bahwa implementasi *E-Procurement* di PT PLN (Persero) Wilayah Makassar tidak berjalan seutuhnya efektif. Hal ini dikarenakan implementasi pengadaan barang dan jasa dianggap kurang begitu mampu mengaplikasikannya dikarenakan minimnya pembinaan dalam hal penerapan langsung praktik menggunakan *E-Procurement* melainkan terfokus untuk teoritis dengan bahasan cukup banyak serta durasi pertemuan yang amat terbatas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* di PT PLN (Persero) UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan?
2. Apa saja kendala dalam implementasi pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* di PT PLN (Persero) UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Bastian (2021), pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pihak pengguna dalam mewujudkan atau mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkannya memakai proses serta metode tertentu agar tercapai kesepakatan spesifikasi, waktu, harga, dan kesepakatan lain. Pihak pengguna dan penyedia



harus berpedoman pada filosofi barang/jasa, norma dan etika yang berlaku, serta pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Padang (2016) menguraikan beberapa tahapan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Langkah-langkah tersebut meliputi fase rencana pengadaan, penetapan panitia, pra-kualifikasi partisipan, persiapan berkas tender, publikasi tender, penerimaan berkas tender, penetapan HPS, penjabaran tender, penyerahan dan membuka proposal, penilaian tawaran, mengumumkan kandidat terpilih, penyanggahan, pengangkatan pemenang, tanda tangan kesepakatan, hingga berakhir dengan pemberian barang dan jasa.

Aspek penting dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dalam pemilihan Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek.

Pengadaan konvensional dinilai mempunyai kekurangan yang berpotensi untuk terjadinya korupsi disetiap prosesnya. Sehingga menghasilkan kontrak-kontrak ilegal dan rawan korupsi. Praktik pengadaan terkadang masih didasarkan pada kepentingan politik atau kepentingan individual.

E-Procurement

Pengadaan barang dan jasa menjadi tugas pokok yang secara konsisten dilakukan dalam sebuah organisasi atau bisnis. Saat ini, banyak instansi yang telah mengganti mekanisme pengadaan barang dan jasa dari konvensional menjadi elektronik atau biasa disebut *Electronic Procurement*.

Menurut Croom and Jones dalam Nugroho *et al.* (2015), *E-Procurement* ialah suatu proses pengadaan yang mengacu pada pemakaian internet sebagai

sarana informasi dan komunikasi. Willem (2012) juga mengatakan bahwa *E-Procurement* ialah penerapan penyediaan barang dan jasa yang memakai koneksi komputer secara online ataupun *electronic data interchange*.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Electronic Procurement* didefinisikan sebagai mekanisme penyediaan barang atau jasa melalui penggunaan kecanggihan teknologi dan perdagangan berbasis IT yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sutedi (2012) juga mengatakan bahwa *E-Procurement* adalah situs web yang berfungsi sebagai sistem pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui sarana internet. Lestyowati, J. (2018) menerangkan proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan berbagai platform bertujuan memfasilitasi ataupun memudahkan proses pengadaan barang dan jasa serta mengurangi hambatan untuk mendapatkan barang dan jasa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif sendiri ialah prosedur penelitian dalam menginterpretasikan isu-isu sosial melalui pelaporan perspektif rinci yang diperoleh dari berbagai sumber informasi, penggambaran lengkap dan terperinci, diungkap secara verbal, hingga dilaksanakan dengan kondisi alami (Walidin *et al.*, 2015).

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena tujuan utamanya yaitu memahami secara mendalam terkait Implementasi *Electronic Procurement* terhadap pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pendekatan kualitatif dapat memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap pandangan, pengalaman dan perspektif para informan.



Adapun proses desain penelitian ini adalah studi kasus, dengan menyelidiki komprehensif terhadap satu orang, satu grup, satu lembaga, satu proyek, aktivitas, dan sebagainya pada suatu titik waktu dengan tujuan untuk menghasilkan data yang memungkinkan deskripsi menyeluruh dan komprehensif dari suatu objek (Abdussamad, 2021). Dalam hal ini, studi kasus yang dilaksanakan yaitu pada fenomena yang terdapat pada implementasi *E-Procurement* khususnya kendala dan solusi optimal di PT PLN (Persero) Unit Induk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Teknik analisis data melibatkan pengkategorian data, membedahnya menjadi unit-unit, menyintesis data, menyusunnya menjadi pola, menentukan data yang paling signifikan untuk diteliti berikutnya, dan menyusun simpulan yang memudahkan data untuk dimengerti diri sendiri dan juga pembaca (Hartono, 2018). Dalam penelitian ini, menggunakan paradigma analisis data yang disebut Miles & Huberman, yang memiliki empat langkah: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam operasional perusahaan, memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang efisien untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sebuah perusahaan dalam hal ini yaitu PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Secara umum, wawancara dilakukan dengan General Manajer menggambarkan pandangan tingkat eksekutif terkait strategi dan tujuan pengadaan di PT PLN. Dengan memahami motivasi dan visi manajemen, dapat menilai dampak transformasi *E-Procurement* terhadap operasional perusahaan secara keseluruhan. Wawancara dengan Staf Pelaksana Pengadaan memberikan perspektif praktis, merinci langkah-langkah implementasi, manfaat harian, dan tantangan yang dihadapi oleh tim. Selain itu, Manajer Perencana Pengadaan membawa

perspektif yang lebih fokus pada perencanaan strategis, kebijakan perusahaan, dan pengelolaan perubahan yang terkait dengan penerapan *E-Procurement*.

Hasil observasi langsung dan analisis dokumen memberikan kontribusi tambahan terhadap pemahaman implementasi *E-Procurement*. Observasi terhadap proses operasional sehari-hari memberikan wawasan mengenai interaksi langsung dengan sistem, sementara analisis dokumen memperkuat temuan dari wawancara dengan memberikan pandangan lebih rinci terkait prosedur, kendala dan perkembangannya.

Implementasi *E-Procurement* terhadap Pengadaan Barang dan Jasa

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah menerapkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) atas dasar efisiensi dan transparansi dalam pengadaan. Seperti yang dikemukakan oleh informan kunci 1 selaku General Manajer:

“Keputusan untuk mengadopsi E-Procurement didorong oleh hasrat kami untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pengadaan. Kami melihatnya sebagai langkah proaktif untuk mengatasi tantangan dalam proses pengadaan tradisional.”

Sejalan dengan itu, informan kunci 2 selaku manajer pelaksana pengadaan juga mengatakan bahwa implementasi *E-Procurement* ini telah dilaksanakan sejak 2013 yang merupakan sebuah inovasi dalam pengadaan barang dan jasa sebagai wujud reformasi birokrasi. Keputusan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk mengadopsi *E-Procurement* sebagai metode pengadaan barang dan jasa adalah langkah strategis yang mendukung efisiensi, transparansi, dan reformasi birokrasi. Transformasi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadapi perubahan global dan memberikan



kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan integritas dalam lingkup pengadaan.

Adapun proses implementasi *E-Procurement* yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang sederhana namun sistematis. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci 1:

“Implementasi E-Procurement melibatkan tahapan yang terukur. Kami mulai dengan analisis kebutuhan, pemilihan sistem yang sesuai, dan penyuluhan ataupun sosialisasi karyawan. Selanjutnya, kami melakukan uji coba dan mengintegrasikan sistem ke dalam operasional harian kami.”

Tahapan yang terukur ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghadapi perubahan dengan cara yang sistematis dan efektif.

Kuantitas dalam Implementasi *E-Procurement*

Dalam konteks *E-Procurement*, kuantitas dapat diukur dari minimnya keluhan yang disampaikan oleh penyedia jasa. Aspek ini mencakup beberapa hal seperti efisiensi biaya, visibilitas ataupun transparansi serta mudahnya perencanaan dan pengendalian. Di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, implementasi pengadaan barang dan jasa menggunakan *E-Procurement* mampu menekan biaya yang cukup signifikan hingga 15-20% dalam prosesnya dengan baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada informan kunci 1, yang menyatakan bahwa:

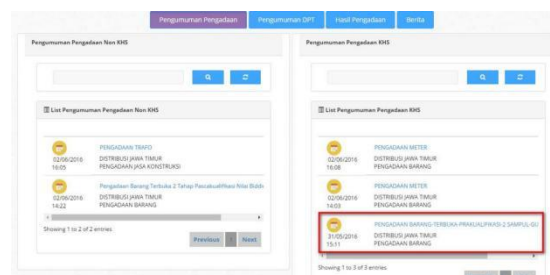
“...manfaat utama yang paling signifikan dalam implementasi E- Procurement termasuk diantaranya pengurangan biaya operasional, percepatan siklus pengadaan, dan peningkatan akurasi dalam pemilihan vendor. Ini memberikan dampak positif langsung pada kinerja perusahaan.”

Selanjutnya, ditemukan bahwa *E-Procurement* membuat penyedia memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap permintaan dan persediaan barang.

Sehingga memungkinkan untuk mengelola stok dengan lebih efisien dan menyesuaikannya dengan permintaan aktual dengan baik. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan kunci 3.

“Manfaatnya meliputi percepatan proses, pengurangan kesalahan manusia, dan transparansi yang lebih baik dalam pengadaan. Kami juga dapat berkomunikasi lebih efektif dengan vendor.”

Gambar 1. Pengumuman Pengadaan pada Portal *E-Procurement*



Sumber: Manual Book E-Proc (2017)

Gambar 1, disajikan tampilan pengumuman pengadaan yang memperlihatkan bahwa tahapan-tahapan dalam proses lelang dapat diketahui oleh pihak calon penyedia barang atau jasa. Selain itu, *E-Procurement* juga membuka peluang untuk implementasi strategi manajemen rantai pasok yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika pasar, dengan memanfaatkan data *real-time* yang diperoleh dari proses pengadaan elektronik.

Selain itu, implementasi *E-Procurement* yang digunakan di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga memudahkan dalam perencanaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna (user) merasakan kemudahan dan efektivitas sistem dalam mendukung proses tersebut. Hasil dari fungsionalitas *E-Procurement* yang mendukung pengelolaan anggaran, penetapan kebutuhan, dan perencanaan proses

pengadaan. Pengguna (user) dalam hal ini PT PLN (Persero) merasa bahwa sistem ini membantu mereka untuk merancang dan mengeksekusi rencana pengadaan dengan lebih efisien. Hal ini seperti disampaikan oleh informan kunci 2, berikut kutipan wawancara.

“Pernyataan tersebut adalah benar, bahwa melalui E-Proc dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta tim dituntut untuk selalu bekerja dengan disiplin terhadap waktu yang telah ditentukan”

Kualitas dalam Implementasi E-Procurement

Dalam konteks pengadaan, kualitas mencakup kecukupan dan keunggulan dalam proses dan hasil. Pada implementasi E-Procurement, kualitas dapat diukur dari perspektif penyedia jasa yang tidak menyampaikan keluhan. Hal ini mencakup beberapa hal yaitu hubungan dengan penyedia (supplier), kepuasan pengguna (user), dampak terhadap biaya transaksi, serta kemampuan dalam meminimalisir human error.

Implementasi E-Procurement di PT PLN (Persero) UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mampu mempererat hubungan dengan penyedia barang dan jasa dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Gupta dan Narain (2015), bahwa E-Procurement adalah strategi e-commerce yang mampu meningkatkan efisiensi organisasi dan juga hubungan mitra dagang dan pemasok. Hasil wawancara juga memperlihatkan terkait segi kemudahan komunikasi melalui E-Procurement.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh informan 4 terkait dampak implementasi E-Procurement terhadap hubungan dengan penyedia bahwa hubungan dengan vendor menjadi lebih terstruktur dan terbuka.

Selain itu, didapatkan bahwa E-Procurement mampu meningkatkan kepuasan pengguna dengan baik. Hasil wawancara kepada informan kunci 2 menyatakan bahwa

“Implementasi E-Proc memang benar dapat meningkatkan kepuasan user secara tidak langsung. Sebab melalui E-Proc, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat selesai serta membuat perusahaan mendapatkan vendor atau penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat sehingga user akan puas dengan hasil pengadaan barang dan jasa”

Lebih lanjut, informan kunci 2 juga menyatakan bahwa E-Procurement mampu mengurangi biaya proses pengadaan barang dan jasa melalui penghematan waktu dan tempat. Implementasi E-Procurement juga mampu meningkatkan efisiensi serta mengurangi kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan baik.

Gambar 2. Tampilan Negosiasi pada E-Procurement



Sumber: Manual Book E-Proc (2017)

Sistem ini dirasa telah berhasil mengotomatisasi tugas-tugas rutin, meminimalkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi, dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Hal tersebut membuat para pengguna (user) merasa bahwa penggunaan E-Procurement telah mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keakuratan data dalam setiap langkah pengadaan.



Ketepatan Waktu dalam Implementasi E-Procurement

Ketepatan waktu mencerminkan kemampuan penyedia barang dan jasa untuk menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dalam implementasi *E-Procurement*, ketepatan waktu mencakup beberapa aspek seperti kesesuaian dengan waktu yang telah ditentukan, peningkatan efisiensi waktu serta mempercepat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Terkait implementasi *E-Procurement* yang telah meningkatkan waktu agar lebih efisien dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memperoleh hasil yang baik.

Gambar 3. Tampilan Evaluasi Administrasi E-Procurement



Sumber: Manual Book E-Proc (2017)

Berdasarkan Gambar 3, memperlihatkan tampilan evaluasi administrasi *E-Procurement*, yang mengindikasikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* dapat terorganisir dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan, dimana keseluruhan mekanisme sudah terintegrasi dalam satu sistem E-Procurement.

Selain itu, implementasi *E-Procurement* juga meningkatkan kinerja dan praktik pengadaan, sehingga menghasilkan ketepatan waktu yang lebih baik dalam proses pengadaan (Muhia dan Afande, 2015). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan kunci 3, bahwa:

“Efisiensi meningkat secara signifikan. Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Kami juga memiliki akses cepat ke data dan laporan yang memudahkan pemantauan.”

Otomatisasi proses yang diperoleh melalui *E-Procurement* dapat menciptakan penghematan waktu yang substansial. Melalui penggunaan algoritma dan otomatisasi tugas-tugas manual, sistem ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan langkah-langkah pengadaan, mulai dari pemesanan hingga konfirmasi pengiriman. Sehingga, para pengguna (user) dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien.

Dengan terhubungnya *E-Procurement* dengan sistem-sistem terkait, seperti manajemen inventaris atau sistem keuangan, informasi dapat dipertukarkan dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi keterlambatan dan kebingungan dalam proses pengadaan. Lebih jauh, proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik menjadikan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional dengan baik. Seperti halnya hasil wawancara dengan informan kunci 5, bahwa peralihan dari pendekatan manual ke penggunaan teknologi bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses perencanaan.

Peran penting *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) yakni peningkatan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi berbagai tahapan dalam proses pengadaan dimulai dari permintaan penawaran hingga pembayaran. Hal ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu transaksi dibandingkan dengan menginput data secara manual. *E-Procurement* juga mengintegrasikan semua proses pengadaan sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas karena akses informasi yang mudah. PT PLN juga menerapkan *E-Procurement* sebagai bentuk keterbukaan dalam perubahan lingkungan

dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang.

Berdasarkan identifikasi implementasi *E-Procurement*, tidak terdapat kendala yang signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Informan kunci 2 dalam wawancara mengemukakan bahwa walaupun tidak terdapat keluhan dalam implementasi *E-Procurement* di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, tetapi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, masih terdapat sedikit keluhan yang dirasakan sebagai pengguna (user). Hal tersebut seperti kendala pada koneksi jaringan yang mana tidak hanya terjadi pada *E-Procurement* saja, tetapi juga pada layanan elektronik berbasis internet lainnya.

Hal ini menunjukkan keberhasilan implementasi *E-Procurement* dapat didistribusikan pada kecanggihan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional sistem. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Vaidyanathan dan Devaraj (2008), bahwa kualitas layanan internet berdampak signifikan terhadap kinerja dan kepuasan pengadaan elektronik. Infrastruktur ini mencakup aspek-aspek seperti kecepatan koneksi, kapasitas penyimpanan data, dan keandalan server. Dengan adanya infrastruktur yang handal, para pengguna dapat mengakses *E-Procurement* dengan cepat dan tanpa hambatan, meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna.

Selain itu, informan kunci 2 juga menuturkan bahwa terdapat kendala spesifik dalam implementasi *E-Procurement* di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yaitu kendala dalam implementasi proses pengadaan langsung, dimana para penyedia barang dan jasa pada proses pengadaan langsung kurang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi.

Diperkuat dari pernyataan wawancara oleh informan kunci 1 bahwa sumber daya manusia

memang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi *E-Procurement*.

Namun, informan kunci 2 juga menuturkan bahwa solusi optimal untuk kendala tersebut ialah dilakukannya pembinaan (*guidance*) secara perlahan terkait penggunaan *E-Procurement* dalam proses pengadaan langsung. Dimana penyuluhan ataupun sosialisasi yang berkualitas juga dapat meningkatkan tingkat adopsi teknologi. Para informan yang merasa terampil dalam menggunakan *E-Procurement* cenderung untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam kegiatan sehari-hari mereka, meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kontribusi pada keberhasilan implementasi.

Solusi tersebut sejalan dengan pernyataan Wibawa (2012) yang mengemukakan bahwa berbagai program penyuluhan ataupun sosialisasi untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pengguna juga menjadi salah satu kondisi yang diperlukan dalam memaksimalkan manfaat dari sistem berbasis elektronik.

Dengan pemahaman yang baik tentang fungsionalitas *E-Procurement*, para pengguna juga dapat mengatasi hambatan teknis, meminimalkan kesalahan, dan mengoptimalkan penggunaan sistem untuk mencapai kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Hasil ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan kunci 2 yang menuturkan bahwa:

"Belum terdapat perhitungan ataupun kalkulasi secara rinci terkait efektivitas pelaksanaan penyuluhan ataupun sosialisasi, namun sudah terdapat progress dimana dalam beberapa proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat pengadaan langsung sudah menggunakan sistem E-Proc".

Dengan demikian, adanya validasi terhadap penyuluhan ataupun sosialisasi menunjukkan bahwa investasi dan perhatian pada pengembangan keterampilan pengguna (user) dalam mengoperasikan *E-Procurement* telah membawa manfaat besar dalam mencapai kesuksesan implementasi *E-Procurement*.

Implementasi *E-Procurement* membuat PT PLN (Persero) dapat mempercepat dan mengoptimalkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, mengurangi biaya administratif, dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh siklus pengadaan barang dan jasa

KESIMPULAN

E-Procurement memiliki peran penting dalam pengembangan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa di PT PLN (Persero). Adapun simpulan yang dapat ditarik berdasarkan temuan yaitu:

1. Implementasi *E-Procurement* di PT PLN (Persero) UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan dengan cukup baik berdasarkan indikator kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.
2. Kendala yang terdapat dalam proses implementasi *E-Procurement* di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah secara spesifik terdapat pada proses pengadaan langsung. Tindak lanjut yang dilakukan terhadap kendala tersebut adalah dilakukannya penyuluhan ataupun sosialisasi yang komprehensif terhadap para pengguna

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Adys. A. K., & Haq, N. (2020). *Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar*. JPPM: Journal of Public Policy and Management, 2(2), 85-92.
- Ardiansyah, A. (2017). *Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang*. In *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan (SENASSET)*, 108-114.

- Chan, J. K., & Lee, M. K. (2003). *SME E-Procurement adoption in Hong Kong-The roles of power, trust and value*. In *36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2003. *Proceedings of the IEEE*, 1-10.
- Bastian, I. (2021). *Manajemen Keuangan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Davila, A., Gupta, M., & Palmer, R. (2003). *Moving procurement systems to the internet: The adoption and use of E-Procurement technology models*. *European management journal*, 21(1), 11-23.
- De Boer, L., Harink, J., & Heijboer, G. (2002). *A conceptual model for assessing the impact of electronic procurement*. *European Journal of purchasing & supply management*, 8(1), 25-33.
- Fandrito, P. K. (2013). *Studi Kesiapan Perusahaan Konstruksi Dalam Penerapan E-Procurement Di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan* [Doctoral dissertation], Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Harelimana, J. B. (2018). *The impact of E-Procurement on the performance of public institutions in Rwanda*. *Global Journal of Management And Business Research*, 18(2), 1-2.
- Hartono, Jogiyanto. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)*. *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Hasti, A., & Gudono. (2013). *Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Makassar*. S2 Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Hidayanto, A. N., Ditari, Y., & Chahyati, D. (2012). *Study of E-Procurement implementation impacts: A case study in PT. PLN*. In *IEEE International Conference on Management of Innovation & Technology (ICMIT)*, 152-157.



- Lestyowati, J. (2018). *Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (Studi Kasus Satker Kementerian Keuangan)*. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 669-695.
- Muhia, D. W., & Afande, F. O. (2015). *Adoption of E-Procurement strategy and procurement performance in state corporations in Kenya (A case of Kenya Revenue Authority)*. Industrial Engineering Letters, 5(6), 1-24.
- Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho, R. S., Wanto, A., H., & Trisnawati. (2015). *Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)*. Jurnal Administrasi Publik, 3(11), 1905-1911.
- Nurchana, A. R. A. (2014). *Efektivitas E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)* [Doctoral dissertation]. Brawijaya University.
- Padang, V. S. (2016). *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Tegal* [Doctoral dissertation]. Universitas Hasanudin.
- Purwanto, S. P. S. (2009). *Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement*. Jurnal Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 9(1), 43-56.
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) (2022). *Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah*, Nomor 0077.P/DIR/2022
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) (2022). *Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah*, Nomor 0077.P/DIR/2022
- PT PLN (PERSERO). (2020). *Peraturan Direksi PT PLN (PERSERO)*. Retrieved from pln.co.id.
- Richard, O. M. (2021). *Automating Procurement (E-Procurement) and its Benefits During the Covid-19 Pandemic*. SSRN Papers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Legal Aspect in Procuring Goods and Services and Some Issues*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tatsis, V., Mena, C., Van Wassenhove, L. N., & Whicker, L. (2006). *E-Procurement in the Greek food and drink industry: drivers and impediments*. *Journal of Purchasing and Supply management*, 12(2), 63-74.
- UKPBJ Kab. Pangkep. (2023). *Layanan Pengadaan Secara Elektronik*. Retrieved from <https://lpse.pangkep kab.go.id/eproc4/publik>
- Vaidyanathan, G., & Devaraj, S. (2008). *The role of quality in E-Procurement performance: An empirical analysis*. *Journal of Operations Management*, 26(3), 407-425.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Wibawa, H. T. (2012). *Analisis terhadap kesiapan implementasi E-Procurement di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo* [Doctoral dissertation], Sebelas Maret University.
- Wijayanti, N. P. (2014). *Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement)(Studi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang)* [Doctoral dissertation], Universitas Brawijaya.
- Willem, Siahaya. (2012). *Manajemen Pengadaan*. Bandung: Alfabeta

